

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari sila kelima Pancasila dan alinea keempat pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu komponen dalam pembangunan suatu daerah dengan mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD).

PAD merupakan satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.¹

Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia terbentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber

¹ Phaureula Artha Wulandari, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 23.

daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat prosentase Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan public (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).²

Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 secara jelas menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain meberikan kekuasaan dalam menetapkan.

² Achmad Sani Alhusain, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), 9.

Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomr 58 tahun 2005 antara lain:

1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.³

APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi

³ Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), 2-3.

pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut.⁴

⁴ Luigi Laurens Derosario Berwulo, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 (2017). 24.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Banten. Dalam rangka meningkatkan perekonomian otonomi daerah yang lebih nyata, maka dari berbagai sumber/sektordan sub sektor yang turut menunjang pendapatan daerah. Kesiapan Kabupaten Lebak sendiri dalam pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya.

Kabupaten Lebak adalah daerah yang berada di provinsi Banten dengan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2013 sebanyak 1.247.906 orang. Kabupaten Lebak mempunyai potensi alam dan ekonomi yang cukup tinggi. Mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan. Namun pemerintah daerah dan Pusat belum mampu meningkatkan hasil yang signifikan demi mensejahterka rakyat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki kabputen Lebak. Berikut ini total PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Tabel 1.1
PDRB di Provinsi Banten (dalam triliunan Rp)
2012-2014

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		
	2012	2013	2014
Kota Tangerang	24,73	24,84	25,47
Kab. Tangerang	21,38	21,53	24,43
Kota Cilegon	16,38	16,33	16,18
Kab. Serang	12,43	12,17	12
Kota Tangsel	11,55	11,76	11,76
Kota Serang	4,58	4,62	4,6
Kab. Lebak	4,47	4,41	4,33
Kab. Pandeglang	4,47	4,34	4,24

Sumber: *Kompas* (25 November 2015)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDRB Kabupaten Lebak pada tahun 2012 sebesar Rp 4,47 triliun atau sama dengan Kab. Pandeglang. Ini merupakan jumlah PDRB terkecil di Provinsi Banten. Sangat miris memang apabila melihat kondisi alam yang kaya raya di Lebak ini, namun belum bisa dikelola dengan maksimal. Kemudian pada tahun 2013 jumlah PDRB mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp 4,41 triliun selanjutnya menurun lagi pada tahun 2014 dengan nilai Rp 4,33 triliun.⁵

⁵ Kompas Mania, Kabupaten Lebak Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Paling Rendah? Dipublikasi tanggal 25 November 2015 <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 14 Juli 2018, pukul 20:11 WIB.

Kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat khususnya pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat sebagai regulator perekonomian mengingat potensi yang sangat besar di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan pemaparan isi latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti atau menganalisa tentang perekonomian pemerintah daerah Kabupaten Lebak, dengan menganalisa perkembangan, tingkat kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebak, dengan judul penelitian, “**Analisis Rasio Keuangan Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah di latar belakang masalah sebelumnya, maka identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lebak termasuk salah satu yang terendah.
2. Potensi sumber daya alam yang kaya di Kabupaten Lebak belum di kelola dengan baik.
3. Pemerintah Kabupaten Lebak masih berharap banyak bantuan dana kepada pemerintah pusat.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perkembangan pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa data laporan pendapatan Kabupaten Lebak dari tahun 2012-2018.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana pandangan prespektif Islam tentang pendapatan asli daerah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui pandangan prespektif Islam tentang pendapatan asli daerah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode yang ditentukan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lebak

Dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dalam peneliti selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dibagi kedalam 5 bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB Ke Satu PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Ke Dua KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini membahas tentang Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Analisis Rasio Keuangan Daerah, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian.

BAB Ke Tiga METODE PENELITIAN. Pada bab ini meliputi Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB Ke Empat PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Pada bab ini meliputi Gambaran Umum Objek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB Ke Lima PENUTUP. Pada bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran.